Realism: Law Review
Volume 1 Nomor 2
Agustus 2023

Pengaruh Ketokohan Pemuka Agama Dalam Politik Elektoral Daerah Nusa Tenggara Barat

Gea Putra Disna Mahardika[1] Muhammad Fariqh Khatami[2]

[1] Program Magister Hukum/Fakultas Hukum/Universitas Islam Indonesia/ Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, geaputradisnadika@gmail.com
[2] Program Ilmu Politik/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta/ Tangerang Selatan, Banten, fariqyayiq@gmail.com

Abstract

The influence of religious figures or what is commonly called Tuan Guru in the West Nusa Tenggara region in electoral politics has indeed had a major impact on the face of the regional political world. A religious figure plays an important role because he has a congregation that is very obedient to the words of his religious figure or Tuan Guru. The involvement of kyai or religious leaders in politics creates new problems and hurts the image of a religious figure who is seen as a transferor of the function of prophecy. By using empirical juridical research methods. The research was conducted in West Nusa Tenggara. The results of this study concluded that from year to year, there were no significant changes that could rival Tuan Guru's character in influencing society.

Keywords*: Electoral Politics, Figures, Religious Figures.*

Abstrak

Pengaruh ketokohan tokoh agama atau yang biasa disebut Tuan Guru pada daerah Nusa Tenggara Barat dalam politik elektoral memang berdampak besar terhadap wajah dunia politik daerah. Seorang tokoh agama mengambil peran penting karena memiliki Jemaah yang sangat patuh pada perkataan tokoh agama atau Tuan Guru nya. Keterlibatan kyai atau pemuka agama dalam politik justru menimbulkan masalah baru dan berdampak negatif citra seorang tokoh agama yang dianggap sebagai pengalih fungsi kenabian. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian dilakukan di daerah Nusa Tenggara Barat dengan metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang dilakukan melalui buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini dan melakukan pengumpulan data-data sekunder dari dokumen terkait, serta metode wawancara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dari tahun ke tahun tidak ada perubahan signifikan yang mampu menyaingi ketokohan Tuan Guru dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat.

Kata Kunci: Politik Elektoral, Ketokohan, Tokoh Agama.

A. PENDAHULUAN

Konsep masyarakat madani yang memiliki hubungan dengan sistem demokrasi di Indonesia (Rais, 1986). Peranan *civil society* memiliki andil yang cukup besar sebagai penyeimbang kekuatan negara dalam meminimalisir dominasi negara untuk mencapai tujuan negara yaitu, mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut dikarenakan memang adanya sebuah konsep yang mengatakan bahwa "*vox populi vox dei*" merupakan dasar dan yang menjadi pondasi kuat dari sebuah sistem demokrasi ketika demokrasi itu berasal dan berakhir untuk rakyat. Karena hal tersebut yang akan menjadikan suatu sistem demokrasi yang kuat dan bertahan lama, seperti di Amerika. Jadi *civil society* atau rakyat akan menjadi bagian terpenting serta yang menjadi prasyarat terjadinya konsolidasi dalam sebuah demokrasi (Alagappa, 2004). Cak Nur juga berpendapat dalam bukunya yang berjudul Cita-cita Politik Islam Era Reformasi, menyatakan bahwa apabila sebuah demokrasi tersebut memiliki sebuah rumah, maka rumah tersebut adalah *civil society* atau masyarakat itu sendiri, dikarena dalam *civil society* terdapat berbagai macam kelompok, perserikatan, partai, organisasi dan lain sebagainya yang bergabung untuk menjadi jembatan antara negara dengan warga negara (Madjid, 1999).

Seiring dengan berjalannya waktu, zaman, dan peradaban umat manusia yang terus berkembang yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dengan kata lain masyarakat berkembang dikarenakan pengaruh dari modernisasi justru mengakibatkan pengaruh yang cukup besar juga dalam bidang perkembangan politik di era modern ini. Akan tetapi perkembangan yang terus mengarah ke arah yang modern ini justru berbanding terbalik dengan perkembangan arus perpolitikan di Indonesia. Arah demokratisasi yang akhir-akhir ini di lancarkan oleh para elit politik justru malah menyasar struktur masyarakat

yang malah dianggap tradisional seperti, pondok pesantren, kiai, ormas agama, dan lain sebagainya yang bersifat rohanian (Syamsuddin, 2013).

Keterlibatan kiai atau pemuka agama dalam politik justru menimbulkan masalah baru dan berdampak negatif pada diri seorang kiai yang dianggap sebagai pengalih fungsi kenabian. Hal ini dikarenakan setiap ulama atau kiai harus mampu mengemban misi para nabi dan sekaligus menjadi tauladan dalam kehidupan masyarakat. Kehidupan dan segala tindak tanduk dari seorang kiai akan senantiasa dipatuhi oleh jemaahnya karena seorang ulama tersebut dianggap sebagai pengalih fungsi kenabian. Itulah yang menyebabkan ulama atau kiai sering mengambil peran sebagai figur yang menentukan pergumulan umat Islam dengan masalah pemerintahan, politik, sosial kultural dan Pendidikan (Anwar, 2003).

Fenomena sosial politik tersebut jika dikaji melalui teori sosiologi memang sangatlah relevan adanya. Dijelaskan dalam teori perilaku memilih (*voting behaviour*) bahwa perilaku memilih merupakan sifat alamiah manusia yang membedakan manusia satu dengan yang lain, tingakah laku dari seorang individu dalam pemungutan suara disebut dengan konsep perilaku memilih. *Voting behaviour* sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu salah satunya adalah kepercayaan terhadap seseorang yang di anggap sebagai tokoh agama atau tokoh masyarakat (Streb, 2016).

Pengaruh seorang tokoh agama dalam kontestasi politik tersebut sangat relevan jika dibedah juga degan menggunakan teori mazhab kolumbia, yang mana teori ini merupakan bentuk tertua dari lingkup kajian perilaku memilih karena teori ini lahir paling awal dari lingkup kajian perilaku memilih masyarakat tersebut. Teori ini disebut sebagai mazhab kolumbia dikarenakan teori ini lahir pada tahun 1950an dan berawal dari penelitian yang

dilakukan oleh Paul Lazarfeld yang dilakukan di Universitas Kolumbia pada 1940 (Bartels, 2008).

Dalam satu dekade terakhir dinamika Pilkada NTB dimulai sejak tahun 2008 hingga saat ini, ketokohan sosok kiai dengan sebutan Tuan Guru dengan basis masa atau Jemaah dengan nama Nahdatul Wathan atau NW memiliki peran yang sangat penting dibalik keberhasilan dan suksesnya seseorang yang akan menjadi Gubernur di Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu sangat menarik sekali untuk melihat faktor sosio-kultural yang menyebabkan pengaruh Tuan Guru atau kiai di NTB secara signifikan dan secara khusus memenangkan calon rekomendasi Tuan Guru atau bahkan Tuan Guru tersebut langsung yang sebagai calonnya.

Oleh karena itu sangat menarik bagi penulis untuk meneliti lebih mendalam terkait dengan "**Bagaimana peran ketokohan seorang Tuan Guru dalam suksesnya seroang calon kepala daerah di wilayah Nusa Tenggara Barat, dan Bagaimana teori sosologi hukum dalam melihat fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat terkait dengan perkembangan teori modernisasi tetapi malah menyasar unsur tradisional"**, dikarenakan isu ini sangat baru dan masih belum ada yang mengangkat ditambah dengan posisi Indonesia yang pada 2024 akan mengadakan pesta politik terbesar sepanjang sejarah berdirinya negara.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan ini menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian dilakukan di daerah Nusa Tenggara Barat. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode yang ingin melihat perkembangan penerapan hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang tidak dapat

hanya dijelaskan berdasarkan sudut pandang normatif saja (Dr. Muhaimin, SH., 2020). Metode penelitian empiris ini juga sering disebut penelitian hukum sosiologis (Susanti, 2018). Dalam penelitian hukum empiris ini penulis menggunakan studi kepustakaan yang dilakukan melalui buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini dan melakukan pengumpulan data-data sekunder dari dukumen terkait, serta metode wawancara dengan beberapa informan. Terkait dengan cara pengambilan data dilapangan, penulis lakukan melalui wawancara langsung dengan para tokoh. Adapun informan penelitian ini berasal dari unsur tokoh agama, pemerhati politik NTB, politisi, dan beberapa pemilih milenial NTB.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Ketokohan Seorang Tuan Guru Dalam Suksesnya Seorang Calon Kepala Daerah di Wilayah Nusa Tenggara Barat.

Dalam sebuah sistem demokrasi, *civil society* atau masyarakat memiliki peran yang sangat penting dan sangat menentukan terkait dengan eksistensinya sebagai syarat pembangunan sistem demokrasi yang sehat. Hal tersebut disebabkan karena sebuaah negara yang berasaskan demokrasi memerlukan partisipasi aktif masyarakat sipil (*civil society*) itu sendiri, karena tanpa peran aktif masyarakat tidak akan pernah berjalan sebuah demokrasi di suatu negara. Melalui ruang publik, negara yang demokratis dituntut untuk menjamin kebebasan aspirasi dari wacana politik dengan melibatkan peran aktif *civil socety*. Unsur ini pula yang membedakan sistem negara demokrasi dengan negara lainnya (Culla, 1999).

Di antara beberapa faktor utama yang menjadi faktor kesuksesan politik praktis yang dilakoni oleh Keluarga Besar NW dengan latar belakang sebagai Tuan Guru

memang menjadi faktor pendongkrak ketokohan para keluarga besar NW. Posisi Tuan Guru di tengah masyarakat Islam Sasak, dijadikan sebagai fungsionaris agama yang tidak semata-mata berbicara soal akhirat tetapi juga tentang urusan-urusan yang bersifat keduniawian (Halevy, 1973).

Dalam masyarakat sasak, Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang masih sangat tradisional masih sangat bergantung pada apa dan bagaimana pengaruh ajaran yang di sampaikan oleh Tuan Guru yang dijadikan sebagai percontohan dalam kehidupan masyarakat. Kepatuhan terhadap setiap perkataan Tuan Guru, yang dianggap menjadi tuntunan untuk mereka hidup karena Tuan Guru dianggap sebagai cerminan fungsional kenabian sehingga masyarakat Jemaah mereka selalu di doktrin untuk selalu senantiasa untuk bersikap sami'na wa aṭo'na atau mendengar perintah serta mematuhi setia ucapan yang keluar dari mulut sang Tuan Gurunya (Dahlan, 2006).

Secara karakteristik masyarakatnya, masyarakat muslim suku sasak NTB masih dominan berbudaya tradisional, masih memiliki kesadaran yang bersifat paternalistik, serta masih memiliki mental agraris yang sangat kuat. (Umam, 2016) Oleh karena hal tersebut sosok Tuan Guru menjadi entitas yang sangat menentukan terhadap wacana atau haluan yang bersifat keagamaan, sosial, pemerintahan, bahkan hingga haluan politik. Ketokohan yang melekat pada gelar “Tuan Guru” itu sendiri bahkan turun hingga garis keturunannya dan bahkan kualitas ucapannya sama didengarnya oleh Jemaah sama halnya mendengar ucapan dari garis keturunan sebelumnya atau ayah dari sang “Tuan Guru”.

Dalam beberapa tahun terakhir proses desentralisasi yang berkembang di Indonesia telah memberikan dampak pada modernisasi serta pemberdayaan politik lokal yang berkembang dalam masyarakat tradisional di sebagian besar wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia, tidak luput juga Nusa Tenggara Barat. (Kingsley, 2012) Dengan terjadinya pergeseran pola pemerintahan yang sentralistik menjadi sebuah sitem pemerintahan yang desentralisasi akhirnya memberikan dampak yang menyebabkan lahirnya sebuah fenomena baru di wilayah Nusa Tenggara Barat, yaitu ditandai dengan semakin menguatnya politik identitas, kekerasan komunal, dan konflik politik yang melibatkan ketokohan antara tokoh adat (menak) dengan tokoh agama (Tuan Guru) (Hiraswati, 2009).

Perubahan haluan kiblat politik pada masyarakat Nusa Tenggara Barat dengan basis massa Organisasi Islam terbesar di NTB yang bernama Nahdatul Wathan dengan sosok yang ada di belakang berdirinya organisasi tersebut yaitu TGKH M. Zainuddin Abdul Majid yang merupakan sosok ulama, kiai, panutan, dan tauladan masyarakat NTB. Perubahan Haluan politik tersebut bermula ketika sang Tuan Guru memulai kontaknya dengan dunia politik, dikarenakan pada saat itu ketokohannya beliau lah yang sangat berpengaruh dalam polarisasi perpolitikan masyarakat sasak. Hal ini lah yang menjadi landasan awal untuk melihat paradigma sosio-politik Jemaah NW (Farurrozi, 2016).

Estafet ketokohan Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid tidak serta merta hilang setelah beliau wafat. Hal tersebut dibuktikan dengan Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi berhasil menempati kursi NTB 1 pada tahun 2008 sampai tahun 2013. Dengan hanya mendapatkan dukungan dari 2 partai kecil mampu melenggang mulus untuk kursi NTB 1 dengan perolehan suara yang sangat jauh dibandingkan dengan pesaingnya yang di dukung oleh partai-partai raksasa. Hal tersebut membuktikan bahwa ketokohan seorang Tuan Guru mampu membuat pembeda dalam kontestasi politik di NTB. Hal tersebut dibuktikan dengan rekor yang dicatatkan oleh TGB pada saat tersebut

dengan mencatatkan diri sebagai gubernur termuda dan gubernur pertama dengan latar belakang organisasi masa (Deni, 2023).

Kemenangan TGB Zainul Majdi dalam perhelatan politik 2008 seolah mempertegas bahwasanya ketokohan seorang Tuan Guru di NTB masih sangat-sangat kuat. Didukung lagi oleh TGB yang meraih kursi NTB satu sebanyak dua periode berturut-turut dengan porsi kemenangan yang cukup jauh dari pesaing-pesaingnya (Mahali, 2023). Bahkan pada saat PilPres 2014 ketokohan TGB di NTB semakin menguatkan bahwa ketokohan seorang Tuan Guru ketika menentukan pilihan politik maka akan secara sendirinya Jemaah pengikut sang Tuan Guru akan ikut memilih pilihan sang Tuan Guru. Hal tersebut di buktikan dalam Pilpres 2014 saat partai Demokrat mendukung pasangan calon Prabowo-Hatta dan pada saat itu TGB lah sebagai ketua DPD partai Demokrat dan hasilnya sangat luar biasa, dengan akhirnya pasangan Prabowo-Hatta mendulang 72,45% suara di wilayah Nusa Tenggara Barat (Oktara, 2015).

Berangkat dari hasil wawancara penulis lakukan dengan beberapa tokoh, penulis menyimpulkan bahwa rentetan hasil politik dalam satu dekade terakhir yang menunjukkan bahwa peran ketokohan seorang Tuan Guru terus berlanjut setelah berakhirnya masa jabatan TGB Zainul Majdi periode kedua. Pada periode selanjutnya yang menjadi pasangan calon untuk PILKADA NTB 1 adalah Zulkiflimansyah yang berpasangan dengan Siti Rohmi Djalilah yang tidak lain adalah kakak kandung dari TGB. Pada posisi ini ketokohan Zulkiflimansyah di NTB tidak ada yang mengenal sosoknya, terlebih karena dia tidak tumbuh di NTB jadi ketokohannya tidak ada yang mengenal. Apalagi ditambah sosoknya juga pernah kalah dalam Pilgub Banten melawan Ratu Atut. Sekarang seseorang yang tidak memiliki ketokohan pada masyarakat NTB akhirnya melenggang mulus naik menjadi Gubernur NTB. Yang menjadi sorotan adalah sosok

wakil Gubernurnya yang merupakan kakak kandung dari TGB. Hal tersebut membuktikan bahwa ketokohan Tuan Guru sangat berpengaruh terhadap daya pilih dan keyakinan masyarakat dalam memilih pemimpinnya karena ketika seorang Tuan Guru memberikan perintah maka jemaahnya patuh karena doktrin *sami'na waato'na*. (Dandi, 2023) *framing* terkait agama dan budaya menjadi hal yang sangat sensitiv dalam tatanan kehidupan Masyarakat beragama dalam mempertahankan integritas keagamaan (Keddie, 2014).

2. Teori Sosiologi Hukum Dalam Melihat Fenomena Terkait Dampak Ketokohan Seorang Tuan Guru Dalam Penentuan Pilihan Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah.

Seiring dengan perkembangan zaman yang terus berkembang kearah yang modern dengan ditunjang oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih menyebabkan arus perkembangan masyarakat dunia terus berkembang dengan pesat tanpa ada halangan berarti yang merintangi. Perkembangan tersebut meliputi semua aspek kehidupan baik itu kehidupan sosial, budaya, ekonomi, hingga kehidupan politik di negara demokrasi seperti Indonesia ini juga ikut mengalami perubahan.

Akan tetapi perkembangan masyarakat yang terus berkembang kearah modern justru tidak berbanding terbalik dalam bidang agama yang tetap berpegang teguh pada ajaran tradisional yang tetap memegang teguh anjuran agama dan kepatuhan masyarakat yang tradisional ini kepada sosok kiai atau pemuka agamanya sangat lah tinggi sehingga arus modern dapat masuk ke bidang agama apabila sosok kiai tersebut menganjurkan dan mengajarkan tentang kemodernan zaman, terlebih pada masyarakat tradisional yang tinggal di pedesaan.

Fenomena sosial politik tersebut jika dikaji melalui teori sosiologi memang sangatlah relevan adanya. Dijelaskan dalam teori perilaku memilih (*voting behaviour*) bahwa perilaku memilih merupakan sifat alamiah manusia yang membedakan manusia satu dengan yang lain, tingkah laku dari seorang individu dalam pemungutan suara disebut dengan konsep perilaku memilih. *Voting behaviour* sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu salah satunya adalah kepercayaan terhadap seseorang yang di anggap sebagai tokoh agama atau tokoh masyarakat. (Streb, 2016)

Fenomena tersebut sangat pas jika dibedah degan menggunakan teori mazhab kolumbia, yang mana teori ini merupakan bentuk tertua dari lingkup kajian perilaku memilih karena teori ini lahir paling awal dari lingkup kajian perilaku memilih masyarakat tersebut. Teori ini disebut sebagai mazhab kolumbia dikarenakan teori ini lahir pada tahun 1950an dan berawal dari penelitian yang dilakukan oleh Paul Lazarfeld yang dilakukan di Universitas Kolumbia pada 1940.

Menurut hasil penelitian dari Lazarfeld dan ilmuan-ilmuan lain yang menganut dan sepaham dengan mazhab kolumbia ini mengemukakan bahwa faktor sosiologis lah yang lebih menentukan preferensi minat pemilihan seseorang. Implikasi dari adanya faktor sosiologis yang sangat kuat dalam mempengaruhi minat pilih seseorang masyarakat kemudian dengan sendirinya akan membentuk aturan sosial yang berlandaskan pada pengelompokan dan karakteristik sosiologis terlebih hal yang sangat sensitif yaitu, agama.

Perilaku memilih pada masyarakat cenderung akan lebih didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang diwariskan secara turun temurun secara tidak sadar yang pada dampaknya akan membuat preferensi tertentu mengenai sosok siapa atau partai apa yang akan mereka pilih. Lazarfeld dalam penelitiannya juga mengatakan bahwa keputusan

untuk memilih dari seseorang tersebut sangat jarang ditentukan oleh pilihan dengan menggunakan rasionalitas.

Secara kontekstual pendekatan yang digunakan dalam teori pendekatan mazhab kolumbia jelas saja relevan untuk diterapkan sebagai pisau analisis guna membedah kasus-kasus tertentu. Terlebih dalam menganalisis masalah dalam masyarakat yang berkaitan dengan nilai-nilai yang mempengaruhi prioritas pilihan politik yang sedang hidup di masyarakat dengan kontur karakteristik masyarakat yang tradisional, yang dalam masyarakat tradisional tersebut masih sangat mempertimbangkan masalah kultur, Pendidikan, serta agama dan semua status sosial kemasyarakatan yang berdasarkan atas unsur tersbut masih berpengaruh sangat kuat terhadap masyarakat yang menanamkan doktrin-doktrin pemahaman terkait ketokohan seseorang yang akhirnya mengakar hingga ke anak cucunya kelak, seperti pemahaman tentang keagamaan yang harus mematuhi anjuran dari tokoh agamanya.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pengaruh ketokohan seorang ulama atau tokoh agama atau di NTB sering disebut dengan Tuan Guru masih memiliki peran yang sangat penting dalam kontestasi politik praktis di wilayah Nusa Tenggara Barat. Sosok Tuan Guru yang dianggap sebagai pengalihfungsian kenabian dan menjadi teladan bagi jemaahnya mengakibatkan arah haluan politik dari Tuan Guru tersebut pasti akan diikuti oleh jemaahnya. Terlebih di daerah NTB sosok ketokohan seorang Tuan Guru yang berasal dari organisasi Islam terbesar di NTB yaitu, Nahdatul Wathan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan politik di sana, hal tersebut dikarenakan adanya doktrin sami’na wa’atha’na

yang telah mengakar sampai ke generasi mudanya sehingga meskipun masyarakat berubah ke arah modern tetapi doktrin tersebut telah mendarah daging dan menjadi identitas tersendiri. Sehingga zaman yang berkembang dengan ekstrem pun tidak mampu untuk menggeser doktrin tersebut.

Fenomena pengaruh ketokohan seorang pemuka agama di beberapa daerah memang tidak bisa dipungkiri pengaruhnya dalam mempengaruhi daya pilih masyarakat dalam menentukan pilihannya pada saat kontestasi politik guna merealisasikan konsep negara demokrasi yang di anut oleh Indonesia. Fenomena tersebut ternyata sudah lama dibedah oleh sosiologi menggunakan pendekatan teori mazhab kolumbia yang bahkan sampai detik ini masih relevan untuk dijadikan pisau analisis dalam membedah permasalahan tersebut.

2. Saran

Seharusnya seorang tokoh agama atau tuan guru merupakan sosok yang dianggap sebagai orang yang dapat dipercaya karena menyampaikan pesan-pesan ajaran agama Islam yang berasal dari Sunnah Nabi dan Al-Qur’an hendaknya tidak ikut terjun ke dalam kotornya dunia politik yang sarat akan kebohongan. Hal tersebut sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip kenabian, bahkan tidak jarang membuat tuan guru menyalahgunakan hadis untuk berpolitik. Karena sesungguhnya politik dengan agama merupakan hal yang tidak dapat disatukan.

DAFTAR PUSTAKA

Alagappa, M. (2004). Civil Society and Political Change in Asia. In *Stanford University Press*. Stanford University Press.

Anwar, R. (2003). *Ulama dalam penyeberangan pendidikan dan hazanah keagamaan*. Ulama dalam penyeberangan pendidikan dan hazanah keagamaan.

Bartels, M. L. (2008). *The Study of Electoral Behavior. Department of Politics and Woodrow Wilson School of Public and International Affair*. Princenton University.

Culla, A. S. (1999). *Maysrakat Madani: Pemikiran, Teori dan Relevansinya dengan Cita-Cita Reformasi*. PT. RajaGrafindo.

Dahlan, F. (2006). *Sejarah Perjuangan dan Pergerakan Dakwah Islamiyah Tuan Guru Haji Muhammad Mutawalli di Pulau Lombok*. Sentra Media.

Farurrozi. (2016). *Tuan Guru: Eksistensi dan Tantangan Peran dalam Transformasi Masyarakat* (Cetakan 1). Sanabil Press.

Halevy, E. E. & E. E. (1973). *Social Change: Sources, Patterns and Conse-quences* (Second Edi). Inc Publisher.

Hiraswati, I. (2009). *Dinamika Peran Elit Lokal di Pedesaan Pasca Orde Baru: Studi Kasus Pergeseran Peran Tuan Guru di Lombok Timur*. LIPI Press.

Keddie, A. (2014). Identity politics, justice and the schooling of Muslim girls: Navigating the tensions between multiculturalism, group rights and feminism. *British Journal of Sociology of Education*, *35*(3), 353–370.

Kingsley, J. J. (2012). Village Election, Violence and Islamic Leadership in Lombok, Eastern Indonesia. *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia*, 285.

Madjid, N. (1999). *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*. Paramadina.

Oktara, A. (2015). Politik Tuan Guru di Nusa Tenggara Barat. *GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *8*(2), 73–82.

Rais, M. A. (1986). *Pengantar Dalam Demokrasi dan Proses Politik*. LP3ES.

Streb, M. J. (2016). Rethinking American electoral democracy, Third edition. In *Rethinking American Electoral Democracy, Third Edition*.

Susanti. (2018). Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan Di Kota Batam. *UIB Repository*, 66–73.

Syamsuddin, M. (2013). Kiai dan politik: keterlibatan kiai madura dalam politik praktis. *Sosiologi Reûektif*, *7 (2)*, 47–71.

Umam, F. (2016). Ulumuna, Volume XIII Nomor 2 Desember 2009 433 TERA ULANG PERAN PROFETIK TUAN GURU DALAM KONTEKS KEBEBASAN BERAGAMA DI PULAU LOMBOK. *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, *6*(August), 128.

Wawancara

Deni Agus Hariono, (2023), Tokoh pemerhati politik Nusa Tenggara Barat, wawancara dilakukan pada 24 April 2023.

Dandi Rizki, (2023), Politisi Muda Lombok Timur, wawancara dilakukan pada 21 April 2023.

Tgh. Mahali Fikri, (2023) Tokoh Agama, wawancara dilakukan pada, 16 April 2023.